

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS (MPK) JOGONALAN

### *IMPLEMENTATION OF EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT POLICIES IN MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS (MPK) JOGONALAN ELEMENTARY SCHOOL*

Siti Nur Handayani

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY

[nsiti0084@gmail.com](mailto:nsiti0084@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan. Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru dan Siswa. Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori dari Miles, Huberman dan Saldana. Keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan dilaksanakan dengan (1) Komunikasi yang tersampaikan melalui visi dan misi sekolah yang diwujudkan dalam program-program yang ada sekolah dan pembaharuan ide pada proses belajar mengajar yang berlangsung kondusif serta rapat yang diadakan untuk pengambilan keputusan (2) Sumberdaya yang berkualitas, sarana prasarana yang cukup memadai, dukungan yang diberikan kepala sekolah dan warga sekolah bagi siswa yang berprestasi, sumber dana yang berasal dari SPP dan BOS serta adanya inovasi dalam pemberian pembelajaran (3) Disposisi yang terlihat dari kerjasama yang terjalin, memiliki semangat gotong royong, komitmen yang baik dari implementor, tanggung jawab akan fasilitas sekolah, serta bentuk kepedulian yang tinggi dari pemimpin pada saat pelaksanaan kebijakan (4) Struktur Birokrasi yang berjalan sesuai dengan struktur yang ada dan setiap bidang memiliki hubungan koordinasi dan intruksi sesuai dengan Tupoksi bidang masing masing, namun belum ada tim khusus dalam peningkatan mutu pendidikan serta belum ada standar baku untuk pengadaan infrastruktur sekolah.

**Kata kunci:** *Implementasi, Mutu Pendidikan, SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan*

#### **Abstract**

*This study aims to describe the Implementation of Education Quality Improvement Policy at Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan Elementary School.*

*This research is a qualitative descriptive research. This research was conducted at SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan. The subjects of this study were the principal, teachers and students. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation study. The data analysis technique used the theory of Miles, Huberman and Saldana. The data validity of the researchers used the triangulation method of sources and techniques.*

*The results showed that the implementation of the Education Quality Improvement Policy at SD Muhammadiyah Jogonalan Special Program (MPK) was carried out by (1) Communication conveyed through the vision and mission of the school which is manifested in existing programs in schools and renewing ideas in the ongoing teaching and learning process. conducive and meetings held for decision making (2) Quality resources, adequate infrastructure, support provided by school principals and school members for high-achieving students, sources of funds from SPP and BOS and innovation in the provision of learning (3) ) The disposition that can be seen from the existing cooperation, has a spirit of mutual cooperation, good commitment from the implementor, responsibility for school facilities, and a form of high concern from the leader during policy implementation (4) Bureaucratic structure that runs in accordance with existing structures and every field has the relationship between coordination and instructions is in accordance with the main duties and functions of each field, but there is no special team in improving the quality of education and there is no standard standard for the procurement of school infrastructure.*

**Keywords :** *Implementation, Quality Education, Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan Elementary School.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peranan penting dalam kehidupan dan kemajuan umat manusia. Hal itu merupakan hak dan kewajiban setiap masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Oleh sebab itu pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat.

Pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Banyak tantangan di dalam bidang pendidikan salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan. Rohman (2012:98-199) mengatakan bahwa kunci pembangunan sumberdaya manusia Indonesia adalah melalui kebijakan penyelenggaraan pendidikan bermutu.

Lahirnya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan fokus perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan menjadi teras. Undang-undang tersebut telah memberikan tonggak penting bagi peningkatan mutu pendidikan melalui perhatiannya pada standarisasi pendidikan nasional. Hal tersebut tercantum di dalam UU No 20 Tahun 2003 yang terdapat pada pasal 50 ayat (2) yang berbunyi “pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.”

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak sekolah dan pemerintah, sehingga tidak mengherankan apabila partisipasi orang tua dalam pendidikan sejauh ini hanya lebih banyak kepada *input* pendidikan (dana), bukan pada proses pendidikannya (monitoring, evaluasi dan akuntabilitas) (Wulandari, 2015:20).

Abdullah, dkk (Abdullah, 2015: 6) mengatakan bahwa mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan.

Menurut Dirjen GTK Kemendikbud, Supriano mengungkapkan, terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yakni kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran (Kemendikbud, 2018). Peningkatan mutu pendidikan merupakan aspek yang perlu untuk diperhatikan seperti yang dikemukakan oleh Dwiningrum (2015:94) bahwa peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar yang menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

Hasil penelitian dari Yuspa Hanum (Dosen UPI, 2015) menjelaskan Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak semudah membalik tangan, karena memperbaiki mutu pendidikan berarti komponen-komponen yang ada dalam pendidikan tentunya juga harus diperbaiki antara lain meliputi: 1. Memperkuat Kurikulum KTSP yang sekarang diberlakukan di Indonesia, 2. Memperkuat Kapasitas Manajemen Sekolah, 3. Memperkuat Sumber Daya Tenaga Kependidikan, 4. Memperkuat Kepemimpinan, 5. Meningkatkan Mutu Mengajar Melalui Program Inovatif Berbasis Kompetensi, 6. Mengoptimalkan Fungsi-Fungsi Tenaga Kependidikan, 7. Perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen (*Continuos quality Improvement* atau CQI) dan proses *Continuous pross Improvement*.

Zamroni (Dwiningrum,2015: 94-97) menjelaskan bahwa ada tiga teori peningkatan mutu yaitu sebagai berikut : 1) *The Total Quality Manajement (TQM)*, 2) *Organizing Business For Excelent*, 3) Model Peningkatan Mutu Faktor Empat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori peningkatan mutu model Peningkatan Mutu Faktor Empat yakni mencakup kultur sekolah, kepemimpinan, manajerial, dan infrastruktur.

Pendidikan dasar atau yang disebut sekolah dasar (SD) merupakan pendidikan formal tingkat dasar yang melandasi pendidikan pada jenjang selanjutnya. Sekolah dasar merupakan tingkatan pendidikan yang dapat membentuk karakter seorang anak. (Wulandari, 2015:24).

Berdasarkan analisis *trend* yang dilakukan dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten klaten rata-rata anak usia 7-12 tahun yang berada pada jenjang sekolah dasar (SD) diperkirakan akan mengalami kenaikan yaitu mencapai 100,53% di tahun 2030 dimana sebelumnya di bawah tahun 2016 mengalami fluktuasi dengan presentase terendah pada tahun 2011 yaitu 98,68%. Permasalahan yang dihadapi terkait perkiraan melonjaknya jumlah sekolah swasta di Kabupaten klaten berdasarkan analisis *trend* yang dilakukan dengan data BPS Kabupaten Klaten selama 10 tahun terakhir diketahui jumlah sekolah swasta diperkirakan sampai tahun 2030 akan mengalami kenaikan yaitu 113 dari jumlah awal pada tahun 2007 yaitu 27 sedangkan sekolah dasar negeri pada tahun 2030 hanya 613 sekolah dari jumlah awal pada tahun 2007 yaitu 772 sekolah.

SD Muhammadiyah Program Khusus Jogonalan merupakan sekolah swasta yang telah berdiri selama 6 tahun terakhir. Sekolah yang baru berdiri ini sudah

mempunyai peserta didik sebanyak 247 peserta di tahun ajaran 2019/2020. Dengan setiap kelas memiliki masing-masing dua rombel. Adapun jarak SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan dengan sekolah lain yaitu 500 meter ke utara ada MI Ma'arif, lalu ke selatan 300 meter ada SDIT Cendekia, di sebelah timur 100 meter ada SDN Prawatan, dan di sebelah barat 500 meter ada SDN Wonoboyo. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan memerlukan kekhususan untuk menarik agar masyarakat bisa mempercayakan putra putrinya untuk bersekolah disana.

Banyaknya sekolah swasta dan negeri yang berada di sekitar SD Muhammadiyah tidak menutup kemungkinan bisa memberikan dampak bagi keberadaan sekolah ini ditambah kondisi dimana sekolah ini baru berdiri. Label program khusus ini memberikan pembeda dari sekolah sekolah lain yang ada di sekitarnya. Program khusus yang ada di SD Muhammadiyah ini menjurus kepada pembinaan keagamaannya dimana peserta didik diajarkan dengan pembiasaan kegiatan keagamaan seperti sholat dhuha, sholat berjamaah, sholat jum'at berjamaah serta terdapat hafalan doa, hadits, dll.

Berdasarkan uraian masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan." Penelitian implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan didasarkan atas empat faktor teori Edward III dan dikombinasikan dengan teori model peningkatan mutu faktor empat oleh Zamroni.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018: 6). Penelitian ini melihat implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus Jogonalan.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini mulai dilakukan dari bulan Februari 2020 – Juni 2020 di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan yang beralamat di Jalan Jogja-Solo, Sumbersari, Prawatan, Jogonalan, Klaten.

### **Target/Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah sebagai informan kunci, sedangkan untuk informan pendukung adalah guru dan siswa. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*. Penentuan sumber secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata atau daerah (Sugiyono, 2007: 216). Fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan dan peningkatan mutu.

### **Data, Instrumen, dan Teknik**

#### **Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara, pedoman studi dokumentasi dan pedoman observasi.

Wawancara pada penelitian ini menjadi teknik yang utama dalam pengumpulan data penelitian. Hal tersebut karena wawancara merupakan teknik yang dapat digunakan untuk pengumpulan data yang paling efektif pada masa pandemi. Wawancara dilakukan di sekolah dan melalui via wa dengan narasumber yaitu kepala sekolah, guru dan siswa. Berakhirnya wawancara sampai ditemukan data yang jenuh.

Studi dokumentasi dilakukan dengan pengambilan data berupa data tenaga pendidik dan kependidikan, perkembangan jumlah siswa, sarana dan prasarana sekolah, data prestasi, beberapa foto yang diambil sebelum pandemi dan data lainnya yang mendukung penelitian mengenai implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Observasi dilakukan hanya sebatas pengamatan kegiatan siswa sebelum masa pandemi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

#### **Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2007: 246) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data yang mengacu pada konsep Miles, Huberman dan Saldana model analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah aktivitas yang dilakukan dalam analisis data diawali dengan kondensasi data dilakukan dengan pemilihan dan penyederhanaan hasil wawancara dengan narasumber yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Selain itu juga dilakukan pemilihan data dari hasil observasi dan dokumentasi.

Selanjutnya data di *display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

### **Uji Keabsahan Data**

Penelitian ini untuk membuktikan keabsahan data menggunakan triangulasi. Moleong (2018:330) mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Uji keabsahan data pada penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi sumber oleh peneliti dilakukan dengan cara data yang telah diperoleh dari salah satu informan divalidasi disilangkan terhadap informan lainnya. Triangulasi metode oleh peneliti dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber atau informan yang sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian untuk menguji kredibilitas data tentang implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan, maka data yang telah diperoleh peneliti selama wawancara dengan informan kemudian dicocokkan dengan observasi dan pencermatan dokumentasi.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam pandangan Edward III menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Subarsono, 2008: 90). Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti megkolaborasikan teori Edward III dengan teori peningkatana mutu “Model Peningkatan Mutu Faktor Empat” yaitu kultur sekolah, infrastruktur, kepemimpinan, dan manajerial.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus Jogonalan dikomunikasikan dengan baik dan melibatkan para pihak pelaksana kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan teori Edward III (Suharno, 2016: 170) yang mengungkapkan bahwa komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik dan sikap tanggapan dari para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Penjelasan mengenai hasil di atas dipaparkan dengan melihat dari aspek peningkatan mutu.

Kultur Sekolah yang dimiliki SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan tercermin dari visi dan misi sekolah yaitu Mencetak Generasi CERDAS Berkarakter Islam tersampaikan melalui proses komunikasi yang dilakukan di sekolah melalui rapat yang diadakan sekolah setiap minggu, bulanan dan tahunan. Visi dan misi yang telah di rapatkan tersebut diwujudkan dengan program program pesantren kilat, mabit, tahfid AL Qur'an, baca tulis Al Qur'an, hafalan Al Qur'an, sholat dhuha, sholat dzuhur berjamaah, sholat ashar berjamaah dan diperkuat dengan program pembinaan karakter dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di sekolah dilakukan dalam pembaharuan ide pada proses belajar mengajar di dalam kelas yang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi yang membuat pembelajaran diberikan enak dan mudah dipahami. Hal ini mengacu pada Zamroni (Dwiningrum, 2015: 96) mengatakan kualitas sekolah berawal dari adanya visi sekolah, yang dijabarkan dalam misi sekolah. Misi sekolah mengandung nilai-nilai yang lebih lanjut nilai-nilai akan berpengaruh terhadap kultur sekolah.

Proses komunikasi juga dilakukan melihat dari aspek infrastruktur. Program

dibuat dengan mengacu pada visi dan misi sekolah yaitu mencetak generasi cerdas berkarakter islam seperti kegiatan sholat dhuha, dzuhur berjamaah, buku amaliyah, hafalan doa, manasik haji, pondok ramadhan. Menurut Zamroni (Dwiningrum, 2015 : 96) misi mengadung aspek konkret yakni berupa strategi dan program yang menuntut keberadaan infrastruktur

Proses komunikasi dalam aspek kepemimpinan dilihat dari cara menanamkan visi pada warga sekolah yaitu melalui rapat-rapat yang dilakukan oleh sekolah di setiap pengambilan keputusan yang diikuti oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), Dikdasmen, Komite Sekolah serta warga sekolah. Zamroni (Dwiningrum, 2015 : 97) mengatakan kepemimpinan merupakan kemampuan untuk menggerakkan, menanamkan, dan mempengaruhi aspek abstrak salah satunya adalah menanamkan visi pada warga sekolah dan sebagainya.

Dalam aspek manajerial proses komunikasi melihat dari proses belajar mengajar di kelas yang berlangsung kondusif yaitu dengan membuat persiapan sebelum mengajar, membuat siswa nyaman di kelas dengan metode pembelajaran yang bervariasi diselingi permainan agar pembelajaran tidak membosankan bagi siswa

## 2. Sumber daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan memiliki sumber daya yang mendukung dan berkualitas. Sumber daya tersebut berwujud sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sumber daya finansial. Hal tersebut sesuai dengan Teori Edward III (Subarsono, 2013: 91) yang mengatakan walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan,

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.

Keadaan sumberdaya dalam aspek kultur sekolah pada Implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan telah didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Guru secara geografis berasal dari luar Jogonalan dan dari Jogonalan. Semua guru pada dasarnya memiliki Standar Kompetensi Minimal (SKM). Guru harus menguasai bidang-bidang apapun salah satunya bidang AIK (Al Islam dan Kemuhammadiyahan) seperti baca tulis Al Qur'an , pembelajaran hadits. Rekrutmen tenaga pendidik mengarah pada Standar Kompetensi Minimal (SKM) misal baca tulis Al Qur'an, Keislamanan, Aqidah dsb. Siswa tercakup dari beberapa wilayah Jogonalan, Wedi, Gantiwarno, Prambanan, Kebonarum, dan Klaten Tengah. Perekrutan siswa baru menggunakan metode variatif seperti jemput bola, sosialisasi di TK, melalui medsos, reklame dan baliho. Selain itu terdapat kegiatan wajib yang harus diikuti oleh siswa selain proses belajar mengajar di dalam kelas adalah kegiatan Hizbul Wathan (HW). Sedangkan untuk Ekstra yang ada yaitu Tapak Suci Pemuda Muhammadiyah (TSPM), Khitobah, Menari, Panahan, Futsal, Melukis. Demi meningkatkan kualitas tenaga pendidik selaku sumberdaya pelaksana kebijakan sekolah melakukan beberapa pelatihan yang dilakukan secara rutin maupun sesuai kebutuhan. Pelatihan diadakan oleh Dinas maupun JSM (Jaringan Siswa Muhammadiyah) diantaranya *In House Training*, Pelatihan KKG , Pelatihan terkait K13, Pelatihan tembang bahasa jawa, pelatihan pembuatan soal HOTS dll. Arif Rohman (Widiyastuti, 2016: 22) menyatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan

adalah faktor yang terletak pada personil pelaksana atau sumberdaya manusia yakni menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Hasil penelitian dari Muhammad Fadhli menjelaskan bahwa kriteria serta indikator yang dapat kita ambil bahwa pendidikan yang bermutu dapat ditingkatkan apabila sekolah memiliki 1) dukungan dari pemerintah, 2) Kepemimpinan Kepala sekolah yang efektif, 3) Kinerja guru yang baik, 4) kurikulum yang relevan, 5) lulusan yang berkualitas, 6) budaya dan iklim organisasi yang efektif, 7) dukungan masyarakat dan orang tua siswa (Fadhli, 2017: 215).

Melihat dari aspek infrastruktur yang keberadaannya dituntut untuk mendukung strategi dan program sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Keadaan sarana dan prasarana sekolah yang ada di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan menunjukkan keadaan yang masih bisa digunakan karena merupakan gedung baru dan sedang berada pada proses penambahan. Terdapat 15 ruangan, masjid, UKS, Koperasi Siswa, perpustakaan kecil, kantin yang buka hari Sabtu, kamar mandi, serta penyediaan tempat cuci tangan untuk mempersiapkan "new normal". Selain itu sekolah membentuk program yang dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan yaitu program bagi guru maupun bagi siswa. Untuk guru terdapat program *In House Training* dan buku pegangan guru. Bagi siswa terdapat program wajib yaitu Hizbul Wathan (HW) dan Tapak Suci Pemuda Muhammadiyah (TSPM) dimana setiap siswa harus mengikuti. Program Ekstra terdapat Pesantren Kilat, Mabit, Baca Tulis Al Qur'an, Hafalan Qur'an, Hafalan Hadits, Musik, Tari, Lukis, Tilawah, Tahfid,

Bimbel, Komunitas Sains, Bahasa Inggris. Siswa di sekolah juga diberikan pembiasaan seperti adab berdoa, kegiatan sholat dhuha dan sholat berjamaah. Pembiasaan yang dilakukan ini memberikan siswa menjadi tertib untuk melaksanakan sholat tepat waktu serta setiap siswa diberikan buku pantauan kegiatan siswa di rumah yang berhubungan dengan akhlakul karimah siswa bertujuan membentuk siswa untuk mempunyai akhlak karimah. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi sekolah. Terdapat pula program tambahan yaitu les untuk kelas 6 serta kelas 4 dan 5. Fasilitas untuk mendukung program diantaranya yaitu ruang kelas, pembicara, pelatih, alat pendukung beserta tempat yang tersedia dalam jumlah cukup dan kondisi baik.

Kepala sekolah sebagai pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk menggerakkan, menanamkan dan mempengaruhi dengan memberikan bentuk dukungan sekolah kepada siswa selagi itu berjenjang seperti ITS *Foreign Language Society* (IFLS), Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Jaringan Sekolah Muhammadiyah (JSM). lomba lomba yang diikuti berasal dari tingkat Dinas, Kecamatan, Kabupaten maupun Nasional. Dukungan yang diberikan berupa support, motivasi, memberikan pelatihan kepada siswa yang mengikuti lomba. Bagi siswa yang mendapat juara diberikan uang pembinaan, piala serta dijadikan contoh saat upacara. Bentuk dukungan ini terbukti dengan bentuk pendampingan guru saat mereka latihan dan di saat perlombaan serta dihidirkannya orang tua juga menjadi bentuk dukungan untuk siswa.

Aspek manajerial pada sumberdaya dilihat dari pembiayaan kebijakan sekolah. Pembiayaan sekolah di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan dilakukan dengan pembuatan RAPBS untuk satu tahun semua warga sekolah ikut membuat, pendanaan berasal dari siswa

yang berupa SPP dan dana BOS. Peneliti hanya bisa pada batas tersebut karena kekurangan dalam penelitian dalam hal keterbukaan data. Selain itu kegiatan manajerial guru di dalam kelas dengan melakukan inovasi pada metode yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar yang bervariasi dan masing-masing guru memiliki metode yang berbeda-beda. Adapun metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, berkelompok, game, problem solving, pelatihan soal, dan latihan ketrampilan.

### 3. Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan menunjukkan bahwa implementor memiliki sifat kerjasama, pemimpin, demokratis, sikap peduli sehingga kebijakan yang ada berjalan dengan baik tercapai visi dan misi sekolah. Hal ini sesuai dengan Teori George C. Edward III (Subarsono, 2015:91-92) menjelaskan bahwa disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Pada aspek kultur sekolah kerjasama yang terjalin antara guru, komite sekolah, dan warga sekolah lainnya berjalan dengan saling gotong royong. Hal tersebut menunjukkan komitmen para *stakeholder* sebagai implementor pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu dilihat dengan adanya paguyuban wali santri via whatsapp, mendiskusikan anggaran dan pembangunan, menjaga lingkungan dan komite bertugas sebagai pengawas. Selain itu untuk menciptakan kultur sekolah yang sesuai dengan visi dan

misi sekolah para pengajar atau guru SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam visi dan misi sekolah dengan pembiasaan kegiatan beribadah seperti sholat dhuha dan sholat berjamaah, menerapkan akhlakul karimah pada siswa seperti hafalan AL Qur'an, Hadits, Hafalan Doa dan Muroja'ah. Selain itu memasukan pembiasaan nilai-nilai keagamaan di rumah dalam buku amaliyah. Pada segi kognitif memastikan memasukkan nilai-nilai dalam proses pembelajaran.

Selain itu kepala sekolah sebagai salah satu implementor di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan memiliki sifat pemimpin yang mengerakkan suatu kebijakan agar dapat terlaksana. Peran tersebut seperti manajerial, mengatur, mengawasi agar mutu terus meningkat dan terjamin kualitasnya. Selain itu kepala sekolah memiliki sifat demokratis dan bentuk kepedulian yang ditandai dengan terbukanya kesempatan kepada seluruh warga sekolah untuk memberikan masukan-masukan maupun permasalahan yang dihadapi dan dilakukannya musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk masa depan SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan. Bentuk kepedulian dalam proses belajar mengajar ditandai dengan memonitor, mengkoordinasi, dan memberikan solusi ketika guru mengalami permasalahan dan kesulitan dalam KBM. Aspek infrastruktur pada disposisi melihat warga sekolah ikut dilibatkan dalam perawatan fasilitas sekolah karena mereka menjadi salah satu pengguna. Sikap warga sekolah ini memberikan dampak pada keberlangsungan dari strategi dan program sekolah dapat terlaksana sehingga meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Zamroni (Dwiningrum, 2015: 96) mengungkapkan bahwa misi mengandung aspek konkret yaitu berupa

strategi dan program, yang menuntut keberadaan infrastruktur. Dalam hal ini berkaitan dengan watak maupun sikap yang dilakukan warga sekolah dalam perawatan fasilitas sekolah.

Salah satu kegiatan manajerial dalam pelaksanaan kebijakan kepala sekolah mengorganisir dengan cara mengkoordinir personil yang terbatas di berbagai bidang untuk mewujudkan dengan amanah dan istiqomah yang secara khusus terfokus walaupun ada di bidang yang terpisah sehingga menjadikan satu ring pengelolaan sekolah demi keberlanjutan masa depan sekolah sesuai dengan kemampuan, keberadaan dan dedikasinya. Serta untuk kestabilan setiap personil harus saling bersinergi mengingat skill mereka yang berbeda. Kegiatan manajerial dalam teori peningkatan mutu faktor empat menurut Zamroni (Dwiningrum, 2015: 97) manajerial merupakan kemampuan konkret dalam mengorganisir, mengeksekusi, memonitor, dan mengontrol.

#### **4. Struktur Birokrasi**

SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan memiliki struktur organisasi seperti pada umumnya struktur birokrasi. Pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu sudah sesuai struktur yang ada di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan. Hubungan koordinasi dan intruksi yang ada di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan di masing-masing bidang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda-beda. Hal itu membuat proses implementasi menjadi efektif karena adanya pembagian tugas dari masing-masing bidang tersebut memudahkan dalam melakukan koordinasi serta tidak membuat pemborosan pada sumber daya yang terbatas. Rohman (Widiyastuti, 2016: 22) mengungkapkan bahwa faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni

menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. Faktor tersebut menentukan kegagalan dan keberhasilan dari implementasi kebijakan.

SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Majelis Dikdasmen, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) alur selanjutnya adalah komite sekolah dan disampingnya adalah kepala sekolah dengan dibantu oleh pengelola sekolah yang terdiri atas waka-waka seperti HUMAS, Kurikulum, Sarpras, AIK, Kesiswaan, dan Kerumahtanggan serta dibantu oleh staf administrasi. Tim khusus dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah berada di tingkat Dikdasmen (pengontrol). Sekolah memiliki di bawah naungan daerah karena peng SK an berada di tingkat daerah. Secara khusus di sekolah belum ada tetapi secara struktur ada litbang saat pembentukan sekolah tetapi belum berjalan maksimal karena SDM yang sudah tua sehingga menyerahkan kepada kepala sekolah semua.

Infrastruktur sekolah yang ada di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan terkait pembangunan fasilitas sekolah menggunakan prosedur dimana sebelum diadakan pembangunan mereka melakukan rapat terlebih dahulu dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Majelis Dikdasmen yang kemudian dibentuk panitia pembangunan yang dibentuk oleh kepala sekolah. Hasil rapat yang dilakukan kepala sekolah, komite, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Dikdasmen diteruskan kepada

panitia pembangunan melalui mandata kepala sekolah kepada ustad/ustadzah yang membantu pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan teori George C. Edward III (Subarsono, 2015:92) mengungkapkan bahwa salah satu aspek struktur yang penting adalah adanya prosedur operasi yang standard.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan tentang Implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan dilaksanakan dengan:

Pada aspek komunikasi menunjukkan bahwa kultur sekolah, infrastruktur, kepemimpinan dan manajerial berjalan dengan tersampainya visi dan misi yang diwujudkan melalui program sekolah. Penanaman nilai visi dan misi sekolah dilakukan melalui rapat-rapat yang diikuti oleh Komite, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), Dikdasmen dan Warga sekolah. Manajerial pada proses belajar mengajar di kelas berlangsung kondusif

Sumber daya pada kultur sekolah, infrastruktur, kepemimpinan dan manajerial yang ada di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan menunjukkan bahwa sekolah memiliki sumber daya yang berkualitas, fasilitas berada pada kondisi baik dan tercukupi dalam mendukung program yang ada di sekolah, sekolah memberikan bentuk dukungan kepada siswa di dalam perlombaan, pembiayaan kegiatan dilakukan dengan pembuatan RAPBS yang berasal dari SPP dan BOS. Sekolah melakukan inovasi pada metode pembelajaran adapun metode yang digunakan sangat bervariasi.

Disposisi pada peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan menunjukkan

bahwa kultur sekolah, infrastruktur, kepemimpinan dan manajerial yang dimiliki implementor dalam menjalankan kebijakan terlihat dari nilai kerjasama yang terjalin saling gotong royong. Penanaman nilai-nilai yang terkandung pada visi dan misi sekolah terlihat dengan pembiasaan kegiatan ibadah. Warga sekolah ikut terlibat dalam perawatan fasilitas sekolah. Kepala sekolah memiliki sifat pemimpin yang menggerakkan suatu kebijakan agar dapat terlaksana. Selain itu, kepala sekolah memiliki sifat demokratis dan bentuk kepedulian. Kepala sekolah mengorganisir dengan cara mengkoordinir personil dari berbagai bidang menjadi satu ring pengelolaan sekolah. Kestabilan berasal dari setiap personil yang saling bersinergi.

Sedangkan struktur birokrasi menunjukkan aspek kultur sekolah, infrastruktur, kepemimpinan, dan manajerial dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan sesuai dengan struktur yang ada. Namun Tim khusus dalam peningkatan mutu pendidikan secara khusus sekolah belum ada tetapi secara struktur ada litbang yang dibentuk pada saat pembentukan sekolah dan belum berjalan dengan maksimal. Standar dalam pengadaan infrastruktur sekolah pemegang keputusan berada di tangan kepala sekolah yang sebelumnya di rapatkan dengan komite dan Dikdasmen sehingga untuk standar yang baku belum ada. Peran setiap bidang memiliki hubungan koordinasi dan intruksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Kepala sekolah dan warga sekolah saling berkoordinasi satu sama lainnya sehingga membuat implementasi menjadi efektif dan tidak membuat pemborosan pada sumber daya yang terbatas.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu

Pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus (MPK) Jogonalan pada aspek struktur birokrasi masih memiliki keterbatasan yaitu pada struktur peningkatan mutu pendidikan belum memiliki struktur yang khusus karena SDM yang sudah tua sehingga belum berjalan maksimal dan juga belum terdapat standar baku terkait pengadaan infrastruktur sekolah, maka dapat diajukan saran-saran sebagai upaya memberi masukan bagi pengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Sekolah lebih baik berinisiatif membentuk bidang khusus yang memantau bagian kualitas pendidikan yang ada di sekolah sehingga bisa memberikan gambaran perbaikan sekolah untuk kedepannya dan pihak yang diberi tanggung jawab bisa melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik.
2. Sekolah sebaiknya membuat standar operasi prosedur (SOP) diberbagai kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan apapun bisa terlaksana dengan baik dan tertata dengan rapi.
3. Sekolah lebih mempertegas terkait pembagian tugas staff admin dan staff tenaga pendidik sesuai dengan bidang masing masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

Dwiningrum, D. S. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Fadhli, M.(2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* Vol. 1 No 02.

Hanum, Y.(2015). Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Guru Profesional. *Prosiding, Konvensi Nasional APTEKINDO VII Dan Temu Karya XVIII FPTK/FT-JPTK Se-Indonesia*

(*Bagian VII Hal 1190 Sd. 1291*). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Kemendikbud. (2018, Agustus 17). <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/08/tingkatkan-mutu-pendidikan-melalui-empat-hal-ini>. Retrieved from [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id): <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/08/tingkatkan-mutu-pendidikan-melalui-empat-hal-ini>.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ridwan Abdullah, dkk. (2015). *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rohman, A. (2012). *Membebaskan Pendidikan : Refleksi Menuju Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori, dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widiyastuti, I. (2016). Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman Yogyakarta. *Skripsi*, 1-2.

Wulandari, A. (2015). Kebijakan Sekolah Tentang Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Serayu Kota Yogyakarta. *Skripsi*, 20.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) tentang *Pendidikan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

